





## VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum
5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum
6. Diketik Oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di pengiriman surat : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
9. Dikirim oleh : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum



Diajukan Pada Tanggal : 2022.

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima, 2022.

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA BIMA, 

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip merupakan sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap perangkat daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

*Handwritten signature*

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);





9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat DPAD adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah Kota Bima.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
10. Klasifikasi Kemanan adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan kemanan Negara, publik dan perorangan.
11. Akses Arsip Dinamis adalah ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
15. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
16. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
18. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

*(Handwritten marks)*

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
21. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
22. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang yang menggunakan arsip dan berasal dari Pemerintah Kota Bima.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang yang menggunakan arsip dan berasal dari luar Pemerintah Kota Bima.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan Informasi Arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk menyediakan Informasi Arsip yang dikategorikan Biasa/Terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.





#### Pasal 4

Ruang lingkup sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
- b. pengaturan Akses Arsip.

## BAB II

### SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

#### Pasal 5

- (1) Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan Arsip Dinamis.

#### Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Arsip yang tercipta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pencipta Arsip dapat diklasifikasikan menjadi Informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia;
  - b. keempat tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi Informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
  - c. keempat tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi Informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
  - d. publik dapat mengakses Informasi yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:



- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Arsip Sangat Rahasia;
  - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi Informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
  - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem Klasifikasi Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 umum
  - b. 100 pemerintahan
  - c. 200 politik
  - d. 300 keamanan dan ketertiban
  - e. 400 kesejahteraan
  - f. 500 perekonomian
  - g. 600 pekerjaan umum dan ketenagakerjaan
  - h. 700 pengawasan
  - i. 800 kepegawaian
  - j. 900 keuangan

### BAB III


#### PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

##### Pasal 7

- (1) Pengaturan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada Pengguna Arsip yang berhak.
- (2) Pengguna Arsip yang berhak mengakses Arsip terdiri dari:
  - a. Pengguna Internal yang ada di Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
  - b. Pengguna Eksternal di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja.

##### Pasal 8

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
  2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
  3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas Arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa/Terbuka, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti
- 



- pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

#### Pasal 9

Pengaturan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar Arsip Dinamis diuraikan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas umum;
- b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas pemerintahan;
- c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas politik;
- d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas keamanan dan ketertiban;
- e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas kesejahteraan;
- f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas perekonomian;
- g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas pekerjaan umum dan ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas pengawasan;
- i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas kepegawaian; dan
- j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pengaturan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan Informasi Arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan, seperti pemasangan kamera pengawas/*Closed Circuit Television* (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kategori Arsip Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi;
  - b. kategori Arsip Terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
  - c. kategori Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia disimpan pada lemari besi.



- (4) Pengamanan fisik dan Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas Kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

I. UMUM

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang Garuda Bendera Kebangsaan Lagu Kebangsaan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	002	Tanda kehormatan /penghargaan untuk Pegawai Iihat 861.1 Bintang Satyalencana Samkarya Nugraha Monumen Penghargaan secara adat Penghargaan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	003	Hari Raya/ Hari Besar Hari Besar Nasional 17 Agustus Hari Pahlawan dan sebagainya Hari Raya Keagamaan Hari Ulang Tahun Hari-hari Besar Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	004	Ucapan Ucapan Terima kasih Ucapan Selamat Ucapan Bela sungkawa Ucapan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
005	Undangan			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
006	Tanda Jabatan Pamong Praja Tanda Pengenal Pejabat lainnya			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
007	Himbauan/ Seruan			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM					
		Gedung Kantor termasuk instalasi Prasarana		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		Fisik Pamong / Kantor Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Tanah Untuk rumah dinas					
	.2	Perabot Rumah Dinas					
	.3	Rumah Dinas Golongan 1					
	.4	Rumah Dinas Golongan 2					
	.5	Rumah Dinas Golongan 3					
	.6	Rumah/ Bangunan Lainnya					
	.7	Rumah Pejabat Negara					
	013	Mess/ Guest House / Asrama		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun / Apartemen		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik / Jasa Listrik		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

X



NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
016	Telepon/Faximili/Internet			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
017	Kecamanan / Keterliban Kantor			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
018	Kelbersihan Kantor			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
019	Protokol Upacara Bendera Tata Tempat Pemasangan Gambar Presiden/Wapres Audiensi/ menghadap pimpinan Alamat- alamat kantor Pejabat Bandir / umbul-umbul / Spanduk			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
3	020	PERALATAN					
.1	Penawaran			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.21	Alat Tulis			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.22	Mesin Kantor			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.23	Perabot Kantor			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.24	Alat Angkutan			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.25	Pakaian Dinas			Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2		3	4	5	6	7
	.26	Senjata		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.27	Pengadaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.28	Inventaris, Ketaatausahaan barang (Kartu Inventaris Barang/ Kartu Inventaris Ruangan)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH		Biasa/ Terbuka	Eselon III		Bidang Teknis
		Meliputi: Barang bergerak dan barang tidak bergerak				Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	031	Sumber Daya Alam		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, KEARSIPAN DAN SANDI					
	041	Perpustakaan Umum		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1						
	.2	Khusus		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.3	Perguruan Tinggi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.4	Sekolah		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.5		Keliling	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
042		Dokumentasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
043		Sosialisasi / Bimbingan Teknis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
045		Kearsipan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.1		Pola Klasifikasi				
.2		Penataan Berkas				
.3		Penyusutan Arsip				
.31		Jadwal Retensi Arsip				
.32		Pemindahan Arsip				
.33		Penilaian Arsip				
.34		Pemusnahan Arsip				
.35		Penyerahan Arsip				
.36		Berita Acara Penyusutan Arsip				
.37		Daftar Pencarian Arsip				
.4		Pembinaan Kearsipan				
.41		Bimbingan Teknis				
.5		Pemeliharaan / Perawatan Arsip				
.6		Pengawetan / Fumigasi				
046		Sandi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
047		Website	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
048		Pengelolaan data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
049		Jaringan Komunikasi data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN				



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1	Repelita/ 8 Sukses		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.11	Pelita Daerah					
.12	Bantuan Pembangunan Daerah					
.13	Bappeda					
051	Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan disini: Proyek Prasarana fisik pemerintahan, Oroyek Prasarana Fisik Pemerintahan, Tambahan Perincian 100 pada 051 Contoh: Proyek Kepejajaran 051.86		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
052	Bidang Politik Bidang Keamanan Dan dan Keterliban Tambahan (Tambahan Rincian 200 pada 052)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
053	Bidang Keamanan/ Keterliban (Tambahan Rincian 300 pada 053) Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tambahan Rincian 400 pada 054) Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
055	Bidang Perekonomian (Tambahan Rincian 500 pada 055) Contoh: Proyek Pasar 055.112		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
056	Bidang Pekerjaan Umum /Ketenagaan (Tambahan Rincian 600 pada 056) Contoh: Proyek Jembatan 056.3		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
057	Bidang Pengawasan (Tambahan Rincian 700 pada 057)		Biasa/ Terbuka Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
058	Bidang Kepegawaian (Tambahan Rincian 800 pada 058)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
059	Bidang Keuangan			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
			(Tambahkan Rincian 900 pada 059)				
7	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN					
	.1	Program Kerja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
061		Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Susunan dan Tata Kerja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
062		Organisasi Badan Non Pemerintah		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
063		Organisasi Badan Internasional		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
064		Organisasi Semi Pemerintah, BKS- AKSI		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
065		Ketatalaksanaan/ Tata naskah/Sistem		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
066		Stempel Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
067		Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
068		Komputerisasi/Siskomdagri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
069		Standar Pelayanan Minimal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
071		Riset	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
072		Survei	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
073		Kajian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
074		Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
075		Kementerian Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
076		Non Kementerian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
077		Provinsi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
078		Kabupaten/Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
094		Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
095		Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
096		Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke luar Negeri	-	-	-	-
097		Perjalanan Menteri ke luar Negeri	-	-	-	-
098		Perjalanan Pejabat Tinggi ke luar Negeri	-	-	-	-
099		Perjalanan Pegawai ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

*[Handwritten Signature]*

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN				
		Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif				
	101	Hubungan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	102	GDN	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	110	PEMERINTAH PUSAT				
	111	Presiden	-	-	-	-
		Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR Amanat Presiden/ Amanat kenegaraan/Pidato				
	.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR	-	-	-	-
	.2	Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato	-	-	-	-
	112	Wakil Presiden	-	-	-	-
	.1	Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR	-	-	-	-
	.2	Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato	-	-	-	-

2

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	113	Susunan Kabinet	-	-	-	-
	.1	Reshuffe	-	-	-	-
	.2	Penunjukan Menteri <i>ad interim</i>	-	-	-	-
	.3	Sidang Kabinet	-	-	-	-
	114	Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-
	.1	Amanat Menteri Dalam Negeri/ Sambutan	-	-	-	-
	115	Kementerian Lainnya	-	-	-	-
	116	Lembaga Tinggi Negara	-	-	-	-
	117	Lembaga Non Kementerian	-	-	-	-
	118	Otonomi/ Desentralisasi/ Dekonsentrasi	-	-	-	-
	119	Kerjasama Antar Kementerian	-	-	-	-
3	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	.04	Laporan Daerah	-	-	-	-
	.042	Monografi Tambahan Kode Wilayah				
	.1	Koordinasi				
	.2	Instansi Tingkat Provinsi	-	-	-	-
	.21	Dinas Otonomi				
	.22	Instansi Vertikal Kerjasama Antar Provinsi/ Daerah				
	.23	Kerjasama Antar Provinsi/ Daerah	-	-	-	-
	121	Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
	122	Wakil Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-

✗



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
123		Sekretariat Wilayah tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
124		Pembentukan / Pemekaran Wilayah Pembinaan /Perubahan Nama Kepala: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gedung, Sungai, Pulau, dan Sebagainya	-	-	-	-
	.1	Geografis, Gedung, Sungai, Pulau, dan Sebagainya	-	-	-	-
	.2	Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
	.3	Forum Koordinasi lainnya	-	-	-	-
125		Pembentukan Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
	.1	Pembinaan /Perubahan Nama Kepala: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai dan sebagainya Pembentukan Wilayah Pemindahan Ibukota Perubahan Batas Wilayah Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
	.2	Pembentukan Wilayah	-	-	-	-
	.3	Pemindahan Ibukota	-	-	-	-
	.4	Perubahan Batas Wilayah	-	-	-	-
	.5	Pemekaran Wilayah	-	-	-	-
126		Pembagian Wilayah	-	-	-	-
127		Penyerahan Urusan	-	-	-	-
128		Swapraja/ Penataan Wilayah/ daerah	-	-	-	-
4	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
		Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan				
131		Sambutan/Pengarahan/Amanat Walikota/Wakil Walikota, Tambahkan Kode Wilayah Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah terima Jabatan.	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
132		Sekretaris Daerah Kota, Tambahkan Kode Wilayah Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah terima Jabatan.	Biasa / Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
134		Forum Koordinas Pemerintah di Daerah	Biasa / Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.1		Muspida	Biasa / Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.2		Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)	Biasa / Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.3		Forum Koordinasi Lainnya	Biasa / Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.4		Kerjasama antar Kabupaten/Kota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
135		Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.1		Pemindahan Ibukota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.2		Pembentukan Wilayah Pembantu Walikota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3		Pembagian Wilayah Kota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.5		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.6		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.7		Pembentukan Ibukota Kota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.8		Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
136		Pembagian Wilayah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
137		Penyerahan Urusan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
138		Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1		Sambutan/Pengarahan / Amanat	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2		Pembentukan Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3		Pemekaran Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4		Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.5		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	139	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTHAN DAN LPB.I				

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1		Administrasi Penyusunan Program dan LPBJ	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.11		Penyusunan Anggaran	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.12		Program Tahunan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2		Pengendalian Pembangunan, Sarana dan Prasarane	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.21		Pembinaan Jasa Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.22		Standar Harga	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3		Data dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.31		Laporan DAK	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.32		Koordinasi Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
6	140	PEMERINTAHAN KELURAHAN				
.1		Pamong , meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal Pembentukan Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
141		Pengakatan, Pemberhentian dan sebagainya	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
142		Penghasilan Pamong Kelurahan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
143		Kekayaan Kelurahan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
144		Dewan Tingkat Kelurahan, Dewan Marga, Rembug Kelurahan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
145		Administrasi Desa	Biasa/ Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
146	1. Kewilayahan 2. Pembentukan Kelurahan 3. Pemekaran Kelurahan 4. Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Kelurahan 5. Perubahan Nama Kelurahan 6. Kerjasama antar Kelurahan		Terbatas	Esseclon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya		Biasa/ Terbuka	Esseclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
148	1. Perangkat Kelurahan 2. Kepala Kelurahan Sekretaris Kelurahan 3. Sekretaris Kelurahan 4. Staf Kelurahan		Biasa/ Terbuka	Esseclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
149	1. Dewan Kelurahan 2. Rukun Tetangga 3. Rukun Warga 4. Rukun Kampung		Biasa/ Terbuka	Esseclon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD				
151	1. Keanggotaan MPR 2. Pencalonan 3. Pemberhentian Recall Pelanggaran 4. Recall Pelanggaran 5. Pelanggaran 6. Persidangan		-	-	-	-
153	1. Kesejahteraan 2. Keuangan 3. Penghargaan		-	-	-	-

NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	154	Hak		-	-		-
	155	Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan Persidangan Sidang Pleru Dengar Pendapat/Rapat Komisi		-	-		-
	156	Reses		-	-		-
	157	Kesejahteraan		-	-		-
	.1	Keuangan		-	-		-
	.2	Penghargaan					
	158	Jawaban Pemerintah		-	-		-
	159	Hak		-	-		-
8	160	DPRD PROVINSI					
	161	Keanggotaan		-	-		-
	.1	Pencalonan		-	-		-
	.2	Pengangkatan		-	-		-
	.3	Pemberhentian		-	-		-
	.4	Recall		-	-		-
	.5	Meninggal		-	-		-
	.6	Pelanggaran		-	-		-
	162	Persidangan		-	-		-
	.1	Reses		-	-		-
	163	Kesejahteraan		-	-		-
	.1	Keuangan		-	-		-
	.2	Penghargaan		-	-		-
	164	Hak		-	-		-
	165	Sekretaris DPRD Provinsi		-	-		-
	166	Badan Kelengkapan Dewan		-	-		-
		(Seperti: Badan kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya)					
9	170	DPRD KOTA					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
171	Keanggotaan		Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Pencalonan		Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	Pengangkatan		Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Pemberhentian		Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.4	Recall		Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.5	Pelanggaran		Biasa/Terbuka	Esseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
172	Persidangan/ Rapat (Meliputi: Paripurna/ Pleno, Komisi/Fraksi, Rapat lainnya, Reses)		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
173	Kesejahteraan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1	Keuangan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	Penghargaan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
174	Hak		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
176	Badan Kelengkapan Dewan Termasuk Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya.		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	180	HUKUM				
.1	Konstitusi (Meliputi: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar)		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.11	Dasar Hukum		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.12	Undang-Undang Dasar		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	GBHN		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Amnesti, Abolisi dan Grasi		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
181	Perdata		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Tanah		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.2	Rumah		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Utang/Piutang		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Gadai		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	1	2	3	4	.32	Hipotik	Terbatas	5	.4	Notariat	Terbatas	Esselon III	182	Pidana	Terbatas	Esselon III	.1	Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	183	Peradilan (Peradilan Agama islam 451.6, Peradilan Perkara Tanah 593.71)	Terbatas	Esselon III	.1	Bantuan Hukum	Terbatas	Esselon III	184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	185	Imigrasi (Meliputi: Visa, Passport, Exit, Reentry, Lintas Batas)	Terbatas	Esselon III
													6			7																							
													6	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH																								
													Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis																									
													Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis																									
													Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis																									
													Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis																									
													Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis																									
													Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis																									



NO	KLASIFIKASI	JENIS AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.1	Visa		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit	Bidang Teknis
.2	Pasport		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit	Bidang Teknis
.3	Exit		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit	Bidang Teknis
.4	Reentry		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit	Bidang Teknis
.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit	Bidang Teknis
186	Kepenjaraan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
187	Kejaksanaan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
188	Peraturan Perundang-undangan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah / Unit	Bidang Teknis
.1	TAP MPR		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah / Unit	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
.2	Undang-Undang Dasar	Undang-Undang Dasar	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.3	Peraturan	Peraturan	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.32	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.33	Peraturan Lembaga Non Departemen	Peraturan Lembaga Non Departemen	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.34	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.341	Peraturan Provinsi	Peraturan Provinsi	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.342	Peraturan Kota	Peraturan Kota	Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
.4	Keputusan		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.41	Menteri		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.43	Lembaga Non Kementerian		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.44	Gubernur		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.45	Walikota		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.5	Instruksi		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.51	Presiden		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.52	Menteri		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	

4



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.53	Lembaga Non Kementerian		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.54	Gubernur		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.55	Walikota		Terbatas	Esseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
11	189	Hukum Adat				
12	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
	191	Perwakilan Asing	-	-	-	-
	192	Tamu Negara	-	-	-	-
193	Kerjasama dengan Negara Asing		-	-	-	-
.1	Ascan		-	-	-	-
.2	Bantuan Luar Negeri/Hibah		-	-	-	-
194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri		-	-	-	-
195	PBB		-	-	-	-

✕

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	196	Laporan Luar Negeri	-	-	-	-
	197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN	-	-	-	-

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

7

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

III. POLITIK

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
1	200	POLITIK				
	201	Kebijakan Umum Meliputi : Kebijakan Umum di Bidang Politik baik Tingkat Pusat maupun Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	202	Orde Baru	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	203	Reformasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	210	KEPARTAIAN				
	211	Lambang Partai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	212	Kartu Tanda Anggota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

T



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	213	Bantuan Keuangan Parpol	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	Perjuangan	Terbatas	Eselon III		Bidang Teknis
	.1	Perintis kemerdekaan				
	.2	Angkatan 45				
	.3	Veteran				
	222	Kekaryaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kekaryaan Ppapabri	Terbatas	Eselon III		Bidang Teknis
	.2	Wredatama				
	223	Keagamaan (Muhammadiyah, NU, Persatuan Tarikat Islam, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	224	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	225	Lembaga Swadaya Masyarakat (Seperti: P.K.D.P, Y.L.K.I, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	226	Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Seperti: Yayasan Jantung, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
4	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
231		Organisasi Kesehatan (Seperti: IDI, IBI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
232		Organisasi Guru (Seperti : Persatuan Guru Republik Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
233		Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
234		Persatuan Advokat Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
235		Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
236		Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
237		Persatuan Wartawan Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
238		Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
239		Organisasi Profesional dan Fungsional lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
5	240	ORGANISASI KEPEMUDAAN				
241		Komite Nasional Pemuda Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
242		Organisasi Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
243		Organisasi Pelajar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
244		Organisasi Pemuda Ansor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
245		Gerakan Pemuda Islam Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
246		Gerakan Pemuda Marhaenis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
247		Dewan Pendidikan Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3			5	6	7
	248	KONI		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
6	250	ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN					
	251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	252	Organisasi Buruh Internasional		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	253	Himpunan Kerukunan Tani		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
7	260	ORGANISASI PEREMPUAN					
	261	Dharma Wanita		Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
262		Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
263		Pemberdayaan Perempuan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
264		Kongres Wanita	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
265		PKK	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
266		Kosgoro	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
267		Perwosi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
268		GOW	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
8	270	PEMILIHAN UMUM				

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	5	6	7		
271	Pencalonan		Terbatas	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
272	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar		Terbatas	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
273	Kampanye		Terbatas	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat	Bidang Teknis	
274	Petugas Pemilu		Terbatas	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
275	Pemilih / Daftar Pemilih		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
276	Sarana 1. TPS 2. Kendaraan 3. Surat Suara 4. Kotak Suara 5. Dana		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	
277	Pemungutan suara / Penghitungan suara		Biasa/Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis	



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
	278	Penetapan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan dan Calon Pemilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	280	PENGUCAPAN SUMPAH JANJI MPR, DPR, DPD	-	-	-	-

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

✶

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	Keamanan Perbatasan Provinsi Kab/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	302	Ketertiban	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	2	310	PERTAHANAN			
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
			312	Laut	-	
			313	Udara	-	
			314	Perbatasan	-	
			320	KEMILITERAN		
3	321	Latihan Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
			322	Wajib Militer	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima
	323	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	324	Kekarya TNI/Pejabat Sipil dan TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	Kepolisian	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	.1	Polisi Pamong Praja				
	.2	Kamra				
	.3	Kanling				
	.4	Jaga Wana				
	332	Huru hara/ Demontrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	333	Senjata Api Tajam	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	336	Surat- surat Kaleng	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	338	Himbauan / Larangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	339	Teroris	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Sipil	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, Pencurian	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	354	Subversi/Penyelundupan/ Narkoba	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan (Seperti : Uang, Ijazah, Dokumen Negara, Kejahatan Pemalsuan Lainnya)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Bidang Teknis
	356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/ KKN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	359	Kajahatan dan Pelanggaran Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	360	BENCANA				
	361	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	363	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	364	Kebakaran .1 Pemadam Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	366	Tsunami	-	-	-	-
	367	Tanggap Darurat	-	-	-	-
	368	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	-
	370	KECELAKAAN/SAR				
371	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	372	Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	373	Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	374	Sungai / Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	375	Gunung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
9	376	KETERTIBAN				
	.1	Kampanye (Meliputi: Himbauan, Pemasangan Spanduk, Keterangan)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.2	Pembinaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.3	Penyelidikan dan Penindakan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.4	Pelanggaran Meliputi: Razia, Sanksi-sanksi, Penyelesaian Perkara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	402	PNPM Mandiri Pedesaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN				
	411	Pembinaan Usaha Gotong Royong	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Swadaya Gotong Royong				
	.11	Penataan Gotong Royong				
	.12	Gotong Royong Dinamis				
	.13	Gotong Royong Statis				
	.14	Pungutan				
	.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Pembinaan				
	.22	Klasifikasi				
	.23	Proyek				
	.24	Musyawarah				
	.3	Latihan Kerja Masyarakat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Kader Masyarakat				
	.32	Kuliah Kerja Nyata (KKN)				

T

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
.33		Pusat latihan				
.34		Kursus-kursus				
.35		Kurikulum/silabus				
.36		Keterampilan				
.37		Pramuka				
.4		Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.41		Program				
.42		Pembinaan Organisasi				
.43		Kegiatan				
.5		Penyuluhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.51		Publikasi				
.52		Peragaan				
.53		Sosio Drama				
.54		Siaran Pedesaan				
.55		Penyuluhan Lapangan				
.6		Kelembagaan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.61		Kelompok Tani				
.62		Rukun Tani				
.64		Dharma Tirta				
412		Perkonomian Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1		Produksi Desa				
.11		Pengolahan				
.12		Pemasaran				
.2		Keuangan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.21		Perkreditan Desa				
.22		Inventarisasi Desa				
.23		Bantuan/Stimulus				
.24		Petunjuk/pembinaan pelaksanaan				

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
.3		Koperasi Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.31		Badan Usaha Unit Desa (BUUD)				
.32		Koperasi Usaha Desa				
.4		Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.41		Jumlah desa yang diberi bantuan				
.42		Pengarah				
.43		Pusat				
.44		Daerah				
.5		Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.51		Pusat				
.52		Daerah				
.6		Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.61		Bantuan Langsung				
.62		Bantuan Kerjasama				
.63		Bantuan Juara Lomba Desa				
413		Prasarana Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1		Prasarana Kelurahan				
.11		Pembinaan				
.12		Bimbingan teknis				
.2		Pemukiman Kembali Penduduk	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.21		Lokasi				
.22		Diskusi				
.23		Pelaksanaan				
.3		Masyarakat Pra Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.31		Pembinaan				
.32		Penyuluhan				
.4		Pemugaran Perumahan dan Lingkungan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.41		Rumah sehat				
.42		Proyek perintis				

X



NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.43	Pelaksanaan				
	.44	Pengembangan				
	.45	Perbaikan kampung				
	414	Pengembangan Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Tingkat Perkembangan Kelurahan				
	.11	Jumlah Kelurahan				
	.12	Pemekaran Kelurahan				
	.13	Pembentukan Kelurahan Baru				
	.14	Evaluasi				
	.15	Bagan				
	.21	Penyuluh Program	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.23	Pelaksanaan				
	.24	Bimbingan / Pembinaan				
	.25	Evaluasi				
	.3	Tata Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Inventarisasi				
	.32	Penyusunan pola tata Kelurahan				
	.33	Aplikasi tata Kelurahan				
	.34	Pemetaan				
	.35	Pedoman pelaksanaan				
	.36	Evaluasi				
	.4	Perlombaan Kelurahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Pedoman				
	.42	Penilaian				
	.43	Kejuaraan				
	.44	Piagam				
	415	Koordinasi Internal dan Eksternal	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Sektor Khusus				
	.2	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)				

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	420	PENDIDIKAN				
	.1	Pendidikan khusus klasifikasi disini pendidikan putra/putri Ijta				
	421	Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pra Sekolah				
	.2	Sekolah Dasar				
	.3	Sekolah Menengah				
	.4	Sekolah Tinggi				
	.5	Sekolah Kejuruan				
	.6	Kegiatan Sekolah				
	.7	Kegiatan Pelajar				
	.71	Reuni Darmawisata				
	.72	Pelajar teladan				
	.73	Resimen Mahasiswa				
	.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa				
	.9	Pendidikan Luar Sekolah /Pemberantasan Buta Huruf				
	422	Administrasi Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran				
	.2	Mapras, Perpeloncoan				
	.3	Tahun Pelajaran				
	.4	Hari Libur				
	.5	Uang Sekolah, Klasifikasikan disini SPP Beasiswa				

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
423	Metode Belajar		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1	Kuliah					
.2	Ceramah, simposium					
.3	Diskusi					
.4	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi					
.5	Tur Kurikulum					
.6	Karya Tulis					
.7	Ujian					
424	Tenaga Pengajar (Seperti : Guru, Dosen, Instruktur, dll)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
425	Sarana Pendidikan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1	Gedung					
.11	Gedung sekolah					
.12	Kampus					
.13	Pusat kegiatan mahasiswa					
.2	Buku					
.3	Perlengkapan Sekolah					
426	Keolahragaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1	Cabang Olah Raga					
.2	Sarana					
.21	Gedung olah raga					
.22	Stadion					
.23	Lapangan					
.24	Kolam renang					
.3	Pesta Olah Raga : PON, Porsade, Olimpiade, dsb					
.4	KONI					
427	Kepemudaan/ Kegiatan Remaja (Seperti: Karang Taruna, Pertukaran Pemuda, Remaja Masjid, dll.)		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

✍



<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>J E N I S   A R S I P</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
428	429	Kepramukaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		Pendidikan Kedinasaan Untuk Depdagri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
431	432	Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Cabang Kesenian				
		.2 Sarana				
		.21 Gedung Kesenian				
		Kepurbakalaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
433	.1	Museum				
		.2 Peninggalan Kuno				
		.21 Candi termasuk Pemugaran				
434	.22	Benda				
		Sejarah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
435	434	Bahasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		Usaha Pertunjukan, Hiburan Kesenangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
436	435	Kepercayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		Legenda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	440	KESEHATAN				
	441	Pembinaan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Gizi				
	.2	Mata				
	.3	Jiwa				
	.4	Kanker				
	.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				
	.6	Perawatan				
	.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)				
	.8	Pekan Imunisasi Nasional (PIN)				
	442	Obat-Obatan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengadaan				
	.2	Penyimpanan				
	443	Penyakit Menular	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pencegahan				
	.2	Pemberantasan, Pencegahan Penyakit Menular Langsung				
	.21	Kusta				
	.22	Kelamin				
	.23	Frambusia				
	.24	TBC/AIDS/HIV				
	.3	Epidemiologi dan Karantina (Epidika)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Kolera				
	.32	Imunisasi				
	.33	Survey Lense				
	.34	Rabies/Anjing gila				

*f*

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
.4		Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.41		Malaria				
.42		Demam Berdarah HDF				
.43		Filaria				
.44		Serangga				
.5		Higiene/Sanitasi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.51		Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM)				
.52		Sarana air minum dan jamban keluarga (Samjaga)				
.53		Pestisida				
444		Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1		Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan,				
.2		Busung Lapar Keracunan Makanan				
.3		Menu Makanan Rakyat				
.4		Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)				
.5		Program Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas				
445		Puskesmas Keliling, Ploklinik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
446		Tenaga Medis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
448		Pengobatan Tradisional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
.1		Pijat				
.2		Tusuk Jarum				
.3		Jamu Tradisional				
.4		Dukun/Paramormal				



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	450	AGAMA				
	451	Islam	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.11	Sholat				
	.12	Zakat Fitrah				
	.13	Puasa				
	.14	MTQ				
	.2	Rumah Ibadah				
	.3	Tokoh Agama				
	.4	Pendidikan				
	.41	Tinggi				
	.42	Menengah				
	.43	Dasar				
	.44	Pondok Pesantren				
	.45	Gedung Sekolah				
	.46	Tenaga Pengajar				
	.47	Buku				
	.48	Dakwah				
	.49	Organisasi/Lembaga Pendidikan				
	452	Protestan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.2	Rumah Ibadah				
	.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine				
	.4	Mazhab				
	.5	Organisasi gerejani				
	453	Katolik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.2	Rumah ibadah				
	.3	Tokoh agama, rohaniawan, Pendeta, Pastor				

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.4	Mazhab				
	.5	Organisasi gerejani				
	454	Hindu	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.2	Rumah Ibadah				
	.3	Tokoh agama, Rohaniawan				
	.4	Mazhab				
	.5	Organisasi keagamaan				
	455	Budha	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Peribadatan				
	.2	Rumah ibadah				
	.3	Tokoh agama, rohaniawan				
	.4	Mazhab				
	.5	Organisasi keagamaan				
	456	Urusan Haji	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	.1	ONH				
	.2	Manasik				
	457	Agama Lainnya	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
		(Meliputi: Peribadatan, Rumah Ibadah, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan)				
7	460	SOSIAL				
	461	Rehabilitasi Penderita Cacat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Cacat Mata				
	.2	Cacat tubuh				
	.3	Cacat mental				
	.4	Bisu / tuli				
	462	Tuna Susila	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Gelandangan				
	.2	Pengemis				

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		.3 Tuna susila				
		.4 Anak Nakal				
	463	Kesejahteraan Anak/ Keluarga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Anak Putus Sekolah				
		.2 Ibu teladan				
		.3 Anak asuh				
	464	Pembinaan Pahlawan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Pahlawan Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan kepada pahlawan dan jandanya				
		.2 Perintis kemerdekaan Meliputi : Penghargaan Tunjangan kepada Perintis				
		.3 Cacat Veteran				
	465	Kesejahteraan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Lanjut Usia				
		.2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi				
	466	Sumbangan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Korban Bencana				
		.2 Pencarian Dana untuk Sumbangan				
		.3 Meliputi: Penyelenggaraan undian, Ketangkasan,				
		.4 Panti Asuhan				
		.5 Panti Jompo				
	467	Bimbingan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Masyarakat suku terasing meliputi: Bimbingan, Pendidikan Kesehatan, Pemukiman				
	468	Palang Merah Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	469	Makam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Umum				
		.2 Pahlawan meliputi : penghargaan kepada				

\*



NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	Pendaftaran Penduduk				
	.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.11	Biodata				
	.12	Nomor Induk Kependudukan				
	.13	Kartu Tanda Penduduk				
	.14	Kartu Keluarga				
	.15	Advokasi Identitas Penduduk				
	.2	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Perpindahan penduduk WNI				
	.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia				
	.23	Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara				
	.24	Daerah Terbelakang				
	.25	Bedol Kelurahan				
	.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Penduduk Indonesia ke luar negeri				
	.32	Orang asing tinggal sementara				
	.33	Orang asing tinggal tetap				
		Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan				
	.34	Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)				
	.4	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Akibat Bencana Alam				
	.42	Akibat Kerusuhan Sosial				
	.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang				
	.44	Pendaftaran penduduk rentan				

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
472		Pencatatan Sipil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1		Kelahiran, Kematian, dan Advokasi Kelahiran				
.11		Kelahiran				
.12		Kematian				
.13		Advokasi kelahiran dan kematian				
.2		Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.21		Perkawinan agama Islam				
.22		Perkawinan agama non Islam				
.23		Perceraian agama Islam				
.24		Perceraian agama non Islam				
.25		Advokasi perkawinan dan perceraian				
.3		Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.31		Pengangkatan anak				
.32		Pengakuan anak				
.33		Pengesahan anak				
.34		Perubahan anak				
.35		Pembatalan anak				
.36		Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
.4		Pencatatan Keperarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.41		Akibat perkawinan				
.42		Akibat kelahiran				
.43		Non perkawinan				
.44		Non kelahiran				
.45		Perubahan WNI ke WNA				
473		Informasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1		Teknologi Informasi				

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	.11	Perangkat keras				
	.12	Perangkat lunak				
	.13	Jaringan komunikasi data				
	.2	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Daerah Maju				
	.22	Daerah Berkembang				
	.23	Daerah Terbelakang				
	.3	Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Pendaftaran penduduk				
	.32	Kejadian vital penduduk				
	.33	Penduduk non registrasi				
	.4	Pelayanan Informasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Media elektronik				
	.42	Media cetak				
	.43	Outlet				
	474	Perkembangan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengaraharan Kuantitas Penduduk				
	.11	Struktur jumlah				
	.12	Komposisi				
	.13	Fertilitas				
	.14	Kesehatan reproduksi				
	.15	Morbiditas penduduk				
	.16	Mortalitas penduduk				
	.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Anak dan remaja				
	.22	Penduduk usia produktif				
	.23	Penduduk lanjut usia				
	.24	Gender				

✶



NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
.3		Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.31		Migrasi antar wilayah				
.32		Migrasi Internasional				
.33		Urbanisasi				
.34		Sementara				
.35		Migrasi non permanen				
.4		Perlindungan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.41		Pengembangan sistem perlindungan				
.42		Pelayanan kelembagaan ekonomi				
.43		Pelayanan kelambagaan sosial budaya				
.44		Partisipasi masyarakat				
.5		Pengembangan Wawasan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.51		Pendidikan jalur sekolah				
.52		Pendidikan jalur luar sekolah				
.53		Pendidikan jalur masyarakat				
.54		Pembangunan berwawasan kependudukan				
475		Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Indikator Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1		Indikator Kependudukan				
.11		Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan				
.12		Pemanfaatan indikator kependudukan				
.13		Sosialisasi indikator kependudukan				
.2		Proyeksi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.21		Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan				
.22		Pemanfaatan proyeksi kependudukan				
.3		Analisis Dampak Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.31		Penyusunan dan Pengembangan				
.32		Pemanfaatan analisis dampak kependudukan				

F

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>J E N I S A R S I P</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
	.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Lembaga Internasional				
	.42	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba				
	.43	Lembaga Usaha Swasta				
	.5	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.51	Lembaga Pemerintah				
	.52	Pemerintah Provinsi dan Kota				
	.53	Pemerintah Kabupaten				
	.6	Analisis				
	476	Monitoring	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	477	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	HUMAS				
	481	Penerbitan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Surat Kabar				
	.2	Majalah				
	.3	Buku				
	.4	Penerjemahan				
	482	Radio	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	RRI				
	.11	Siaran Pedesaan jangan di klasifikasi di sini				
	.2	Non RRI				
	.3	Luar Negeri				
	483	Televisi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
484	Film		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
485	Pers .1 Kewartawanan .2 Wawancara .3 Informasi Nasional		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
486	Grafika		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
487	Pencerangan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
488	Operation Room		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
489	Hubungan Masyarakat		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
490	Pengaduan Masyarakat		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

4



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

VI. PEREKONOMIAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN				
	.1	Dewan Stabilitas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	501	Pengadaan Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	502	Pengadaan Sandang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi masalahnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	504	Koordinasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	505	Produksi Daerah .1 Monitoring Potensi Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	506	BUMD Pembinaan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
	.1	Promosi Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.11	Pekan Raya				
	.12	Iklan				
	.13	Pameran non komersil				
	.2	Pelelangan				
	.3	Tera				
	511	Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Sembilan Bahan Pokok, tambahkan kode wilayah : Beras, Garam, Tanah, Minyak Goreng				
	.2	Pasar				
	.3	Pertokoan, Kaki Lima, Kios				
	512	Ekspor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	513	Impor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	514	Perdagangan Antar Pulau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	515	Perdagangan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

A

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	516	Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	517	Aneka Usaha Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	518	Koperasi untuk BUUD, KUD Lihat ( 412.31 - 412.32)				
3	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman Pangan Program	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Program				
	.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit				
	.12	Penyuluhan				
	.2	Produksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.21	Padi/Panen				
	.22	Palawija				
	.23	Jagung				
	.24	Ketela Pohon/Ubi-ubian				
	.25	Hortikultura				
	.26	Sayuran/Buah-buahan				
	.27	Tanaman Hias				
	.28	Pembudidayaan Rumpun Laut				
	.3	Sarana Usaha Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.31	Peralatan meliputi : Traktor dan peralatan dll				
	.31	Pembibitan				
	.33	Pupuk				
	.34	Air irigasi				
	.4	Perlindungan Tanaman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.41	Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang				
	.42	Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus dan Sejenisnya				

\*



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.43		Pemberantasan hama meliputi: penyemprotan, penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan melalui Udara				
.44		Pestisida				
.5		Tanah Pertanian Pangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.51		Persawahan				
.52		Perladangan				
.53		Kebun				
.54		Rumpun Ikan Laut				
.55		KTA/ Lahan Kritis				
.6		Pengusaha Petani	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.7		Bina Usaha				
.71		Pasca Panen				
.72		Pemasaran hasil				
522		Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1		Program				
.11		Hak Pengusahaan Hukum				
.12		Tata guna hutan				
.13		Perpetaan hutan				
.14		Tumpang sari				
.2		Produksi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.21		Kayu				
.22		Non kayu				
.3		Sarana Usaha Kehutanan				
.4		Penghijauan, Reboisasi				
.5		Kelestarian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.51		Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa				
.52		Berburu meliputi: Larangan dan izin berburu				
.53		Kebun Binatang				

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.54	Konservasi Lahan				
	.6	Penyakit/Hama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.7	Jenis -Jenis Hutan				
	.71	Hutan Hidup				
	.72	Hutan Wisata				
	.73	Hutan Produksi				
	.74	Hutan Lindung				
	523	Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Program				
	.11	Penyuluhan				
	.12	Teknologi				
	.2	Produksi				
	.21	Pelelangan				
	.3	Usaha Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.31	Pembibitan				
	.32	Daerah Penangkapan				
	.33	Pertambakan, meliputi : tambak ikan air deras, tambak udang dan lain-lain				
	.34	Jaring terapung				
	.4	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.41	Peralatan				
	.42	Kapal				
	.43	Pelabuhan				
	.5	Pengusaha				
	.6	Nelayan				
	524	Peternakan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Produksi				
	.11	Susu Ternak Rakyat				
	.12	Telur				
	.13	Daging				

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.14	Kulit				
	.2	Sarana Usaha Ternak	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.21	Pembibitan				
	.22	Kandang Ternak				
	.3	Kesehatan Hewan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.31	Penyakit hewan				
	.32	Pos Kesehatan Hewan				
	.33	Tesi pullorum				
	.34	Karantina				
	.35	Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahannya				
	.4	Perunggasan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	.5	Pengembangan Ternak				
	.51	Inseminasi Buatan				
	.52	Pembibitan/Bibit Unggul				
	.53	Penyebaran Ternak				
	.6	Makanan Ternak				
	.7	Tempat Pemotongan Hewan				
	.8	Data Peternakan				
	525	Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Program				
	.2	Produksi				
	.21	Karet				
	.22	Teh				
	.23	Tembakau				
	.24	Tebu				
	.25	Cengkeh				
	.26	Kopra				
	.27	Kopi				

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	.28	Coklat					
	.29	Aneka Tanaman					
	526	Jambu Mente		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	527	Tanaman Tahunan					
	528	Tanaman Semusim					
4	530	PERINDUSTRIAN					
	.08	Undang-undang Gangguan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	531	Industri Logam		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	532	Industri Mesin/Elektronik		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	533	Industri Kimia/Farmasi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	534	Industri Tekstil		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan/Minuman		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	536	Aneka Industri/Perusahaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis
	537	Aneka Kerajinan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
538	Usaha Negara/BUMN		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis	
.1	Perusahaan Jawatan (Perjan)						
.2	Perusahaan Umum (Perum)						
.3	Perseero/ PT.CV						
539	Perusahaan Daerah/ BUMD/BLUD		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis	
540	PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN						
541	Minyak Bumi/ Bensin		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis	
.1	Pengusahaan						
542	Gas Bumi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis	
.1	Eksplotasi/Pengeboran						
.11	Kontrak Kerja						
.2	Pengolahan meliputi: Tangki, Pompa, Tanker						
543	Aneka Tambang		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis	
.1	Timah						
.2	Aluminium Boksit						
.3	Besi termasuk Besi Tua						
.4	Tembaga						
.5	Batu Bara						
544	Logam Mulia, Emas, Intan, Perak		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ unit Kerja	Bidang Teknis	
545	Logam		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
546	Geologi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis	
.1	Vulkanologi						
.11	Pengawasan Gunung Berapi						
.2	Sumur Artesis, Air Bawah Tanah						

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
547	Hidrologi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
548	Kesamuderaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
549	Pesisir Pantai		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
6	550	PERHUBUNGAN				
551	Perhubungan Darat		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu					
.2	Angkutan Jalan Raya					
.21	Perizinan					
.22	Terminal					
.23	Alat Angkutam					
.3	Angkutan Sungai		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.31	Perizinan					
.32	Terminal					
.33	Pelabuhan					
.4	Angkutan Danau		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.41	Perizinan					
.42	Terminal					
.43	Pelabuhan					
.5	Feri		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
.51	Perizinan					
.52	Terminal					
.53	Pelabuhan					
.6	Perkereta Api					

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	552	Perhubungan Laut Lalu lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum Keamanan lalu lintas, rambu-rambu Pelayanan Dalam Negeri Pelayanan luar Negeri Perkapalan Alat Angkutan Pelabuhan Pengerukan Penjagaan Pantai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	553	Perhubungan Udara Lalu lintas Udara/ Keamanan lalu lintas udara Pelabuhan Udara Alat angkutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	554	POS Meliputi Pos biasa, Pos Wesel, Kilat biasa, Kilat Khusus, dll	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	555	Telekomunikasi Telepon Telegram Telex/SSB, Faximile Satelit, Internet Stasiun Bumi, Parabola	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	556	Pariwisata dan Rekreasi Obyek Kepariwisataaan TMII Perhotelan Travel Service Tempat Rekreasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	557	Meteorologi Ramalan Cuaca Curah Hujan Kemarau Panjang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2		3	4	5	6	7
7	560	TENAGA KERJA					
	.1	Pengangguran		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	561	Upah		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	564	Tenaga Kerja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Butsi					
	.2	Padat Karya					
	565	Perselisihan Perburuhan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	566	Keselamatan Kerja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan Kerja		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	569	Tenaga Orang Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	570	PERMODALIAN				
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan (Join Venture/ Penyertaan Modal)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	576	Belanja Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	577	Modal daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	580	PEBANKAN DAN MONETER				
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	583	Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	585	Perasuransian / Asuransi Dana Kecelakaan Lalu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	586	Alat Pembayaran, Cek Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

T

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
10	590	AORARIA				
	591	Tata Guna Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pemetaan dan Pengukuran				
	.2	Perpetaan				
	.3	Penyediaan Data				
	.4	Fatwa Tata Guna Tanah				
	.5	Tanah Kritis				
	592	Landreform	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Redistribusi				
	.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan				
	.12	Pentuan Tanah Obyek Landreform				
	.13	Pembagian Tanah Obyek Landreform				
	.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform				
	.2	Ganti rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.21	Ganti Rugi Tanah kelebihan				
		Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah, Kelebihan Tanah				
	.22	Ganti Rugi Tanah Absentee				
		Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee				
	.23	Ganti Rugi Tanah Partikelir				
	.3	Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.31	Penetapan Imbangan Bagi Hasil				
	.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil				
	.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil				
	.4	Gadai tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.41	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan				
	.42	Pelaksanaan Gadai Tanah				
	.43	Sengketa Gadai Tanah				

T

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.5	Bimbingan dan Penyuluhan				
	.6	Pengembangan				
	.7	Yayasan Dana Landreform				
	593	Pengurusan Hak-hak Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.01	Penyusunan Program dan Bimbingan teknis				
	.1	Sewa Tanah				
	.11	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu: Tebu, Tembaku, Rosela, Chorcorus				
	.2	Hak Milik		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.21	Perorangan				
	.22	Badan Hukum				
	.3	Hak Pakai				
	.31	Perorangan				
	.311	Warga Negara Indonesia (WNI)				
	.312	Warga Negara Asing (WNA)				
	.32	Badan Hukum				
	.321	Badan Hukum Indonesia				
	.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing				
	.33	Tanah Gedung-gedung Negara				
	.4	Guna Usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.41	Perkebunan Besar				
	.42	Perkebunan Rakyat				
	.43	Peternakan				
	.44	Perikanan				
	.45	Kehutanan				
	.5	Hak Guna Bangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.51	Perorangan				
	.52	Badan Hukum				
	.53	P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)				
	.54	Badan hukum asing Belanda -Prk No. 5156				
	.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)				

f



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.6 .61 .62 .7 .71 .8 .81 .82 .83	Hak Pengelolaan PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	594 .1 .11 .12 .13 .14 .2 .3 .4	Pendaftaran Tanah Pengukuran / Pemetaan Fotogrametri Teristris Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965) Sertifikat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	595 .1 .2 .3 .4	Lahan Transmigrasi Tata Guna Tanah Landreform Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

✶

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	PEKERJAAN UMUM				
	601	Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Tender				
	.2	Penunjukan				
	.3	Prakualifikasi				
	.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)				
	.32	Tanda Daftar Rekanan				
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Tanah dan Batu				
	.2	seperti : Batu belah, Steen slaag, Splitt dsb				
	.3	Aspal, Aspal buatan, Aspal alam (Butas)				
	.31	Besi dan logam lainnya				
	.31	Besi beton				
	.32	Besi Profil				

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.33 .34 .4 .5 .6 .7 .8 .9	Paku Aluminium, profil Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat, Tech Tili) Pengawet kayu Semen Kayu Bahan penutup atap (Genting, asbes gelombang, seng dan sebagainya) Alat pengantungan dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya				
	605 .1 .2 .3 .4 .5 .6	Instalasi Instalasi Bangunan Instalasi Listrik Instalasi Air Sanitasi Instalasi Pengatur Udara Instalasi Akustik Instalasi Cahaya/Penerangan, dll	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	606 .1 .2 .3 .4 .5 .6	Konstruksi Pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Konstruksi pencegahan terhadap gempa Konstruksi pencegahan terhadap angin udara/ panas Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive Konstruksi pencegahan terhadap serangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

\*



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.7	Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom				
	607	-	-	-	-	-
	608	-	-	-	-	-
	609	-	-	-	-	-
2	610	PENGAIRAN				
	611	Irigasi	Biasa / Terbuka	Escion III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Bangunan Waduk				
	.11	Bendungan				
	.12	Tanggul				
	.13	Pelimpahan Banjir				
	.14	Menara Pegambilan				
	.2	Bangunan pengambilan				
	.21	Bendungan				
	.22	Bendungan dengan pintu bilas				
	.23	Bendungan dengan pompa				
	.24	Pengambilan bebas				
	.25	Pengambilan bebas dengan pompa				
	.26	Sumur dengan pompa				
	.27	Kantung lumpur				
	.28	Slit Ekstrator				
	.29	Escope Chanrel				
	.3	Bangunan Pembawa				
	.31	Saluran				
	.311	Saluran Induk				
	.312	Saluran sekunder				
	.313	Suplesi				

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.314	Tersier				
	.315	Saluran Kwartir				
	.316	Saluran Pasangan				
	.317	Saluran Tertutup/ Terowongan				
	.32	Bangunan				
	.321	Bagunan Bagi				
	.322	Bangunan Bagi dan Sedap				
	.323	Bangunan Sadap				
	.324	Bangunan Check				
	.325	Bangunan Terjun				
	.33	Box tersier				
	.34	Got Miring				
	.35	Talang				
	.36	Syphon				
	.37	Gorong - gorong				
	.38	Pelimpah samping Bangunan Pembuang				
	.4	Bangunan Pembuang				
	.41	Saluran				
	.411	Saluran Pembuang Induk				
	.412	Saluran Pembuang Skunder				
	.413	Saluran Tersier				
	.42	Bangunan				
	.421	Bangunan Outlet				
	.422	Banguan Terjun				
	.423	Bangunan Penahan Banjir				
	.43	Gorong-Gorong Pembuang				
	.44	Talang Pembuang				

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.45	Sypon Pembuang				
	.5	Bangunan Lainnya				
	.51	Jalan				
	.511	Jalan Inspeksi				
	.512	Jalan Logistik Waduk Lapangan				
	.52	Jembatan				
	.521	Jembatan Inspeksi				
	.522	Jembatan Hewan				
	.53	Tangga Cuci				
	.54	Kubangan Kerbau				
	.55	Waduk Lapangan				
	.56	Bangunan Penunjang				
	.57	Jaringan Telepon				
	.58	Stasiun Agro				
	612	Folder	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Tanggul Keliling				
	.11	Tanggul				
	.12	Bangunan penutup sungai				
	.13	Jembatan				
	.2	Bangunan Pembawa				
	.21	saluran				
	.211	Saluran muka				
	.212	Saluran pembawa waduk				
	.213	Saluran pembawa sekunder				
	.22	Stasiun Pompa Pemasukan				
	.23	Bagunan bagi				
	.24	Gorong-gorong				
	.25	Syphon				
	.3	Bangunan pembuang				

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.31 Stasiun pompa pembuang .32 Saluran .321 Saluran pembuang induk .322 Saluran pembuang sekunder .33 Pintu air pembuangan .34 Gorong-gorong pembuangan .35 Syphon pembuangan .4 Bangunan Lainnya .41 Bangunan .411 Bangunan pengukur air .412 Bangunan pengukur curah hujan .413 Bangunan gudang stasiun pompa .414 Bangunan listrik stasiun pompa .42 Rumah petugas Akseptasi		Biasa/ Terbuka	Escalon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	613 Pasang Surut .1 Bangunan Pembawa .11 Saluran .111 Saluran pembawa induk .112 Saluran pembawa sekunder .113 Saluran penawar tersier .114 Saluran penyimpanan air .12 Bangunan pintu pemasukan .2 Bangunan pembuang .21 Saluran .211 Saluran pembuang induk .212 Saluran pembuang sekunder					

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.213	Saluran pembuang tersier				
	.214	Saluran pengumpul air				
	.22	Bangunan pintu pembuang				
	.3	Bangunan lainnya				
	.31	Kolam pasang				
	.32	Saluran				
	.321	Saluran lalu lintas				
	.322	Saluran muka				
	.33	Bangunan				
	.331	Bangunan penangkis kotoran				
	.332	Bangunan pengukur muka air				
	.333	Bangunan pengukur curah hujan				
	.34	Jalan				
	.35	Jembatan				
	614	Pengendalian Sungai	Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Bangunan Pengamanan				
	.11	Tanggul banjir				
	.12	Pintu Pengatur banjir				
	.13	Klep pengatur banjir				
	.14	Tembok pengaman Talud				
	.15	Krib				
	.16	Kantung lumpur				
	.17	Check-Dam				
	.18	Syphon				
	.2	Saluran pengaman				
	.21	Saluran banjir				
	.22	Saluran Drainase				

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.23	Corepure				
	.3	Bangunan Lainnya				
	.31	Warning System				
	.32	Stasiun				
	.321	Stasiun pengukur curah hujan				
	.322	Stasiun pengukur air				
	.323	Stasiun pengukur cuaca				
	.324	Stasiun pos penjagaan				
	615	Pengamanan Pantai				
	.1	Tanggul				
	.2	Krib				
	.3	Bangunan lainnya				
	616	Air Tanah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Stasiun Pompa				
	.2	Bangunan pembawa				
	.3	Bangunan Pembuang				
	.4	Bangunan lainnya				
	617		-	-	-	-
	618		-	-	-	-
	619		-	-	-	-
3	620	JALAN				
	621	Jalan Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan				
	.11	Tanah				
	.12	Tanaman				
	.13	Bangunan				
	.2	Bangunan sementara				
	.21	Jalan sementara				

✶



NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	.22	Jembatan sementara					
	.23	Kantor proyek					
	.24	Gudang proyek					
	.25	Barak kerja					
	.26	Laboratorium lapangan					
	.27	Rumah					
	.3	Badan jalan					
	.31	Pekerjaan tanah (Earth Work)					
	.32	Stabilitas					
	.4	Perkerasan					
	.41	Lapis pondasi bawah					
	.42	Lapis pondasi					
	.43	Lapis permukaan					
	.5	Drainage (Culvert)					
	.51	Parit tanah					
	.52	Gorong-gorong					
	.6	Buku Trotuir					
	.61	Tanah					
	.62	Perkerasan					
	.63	Pasangan					
	.7	Median					
	.71	Tanah					
	.72	Tanaman					
	.73	Perkerasan					
	.74	Pasangan					
	.8	Daerah samping					
	.82	Tanaman					
	.83	Pagar					

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan				
	.91	Rambu-rambu/ tanda lalu lintas				
	.92	Lampu penerangan				
	.93	Lampu pengatur lalu lintas				
	.94	Patok-patok KM				
	.95	Patok-patok ROW (Sempadan)				
	.96	Rel pengamanan				
	.97	Pagar				
	.98	Turap Penahan				
	.99	Bronjong				
	622	Jalan Luar Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan Tanah				
	.11	Tanaman				
	.12	Bangunan				
	.13	Bangunan Sementara				
	.2	Jalan sementara				
	.21	Jembatan sementara				
	.22	Kantor proyek				
	.23	Gedung proyek				
	.24	Barak kerja				
	.25	Laboratorium lapangan				
	.26	Rumah				
	.27	Badan jalan				
	.3	Pekerjaan tanah (Earth Work)				
	.31	Stabilisasi				
	.32	Perkerasan				
	.4	Lapis pondasi bawah				
	.41					

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.42	Lapis pondasi				
	.43	Lapis permukaan				
	.5	Drainase				
	.51	Parit				
	.52	Gorong-gorong (culvert)				
	.53	Sub Drainase				
	.6	Trotoar				
	.61	Tanah				
	.62	Perkerasan				
	.7	Median				
	.71	Tanah				
	.72	Tanaman				
	.73	Perkerasan				
	.74	Pasangan				
	.8	Daerah samping				
	.81	Tanaman				
	.82	Pagar				
	.9	Bangunan perlengkapan dam pengamanan				
	.91	Rambu-rambu / Tanda lalu lintas				
	.92	Lampu penerangan				
	.93	Lampu pengatur lalu lintas				
	.94	Patok-patok KM				
	.95	Patok-patok ROW (Sempadan)				
	.96	Rel pengamanan				
	.97	Pagar				
	.98	Turap Penahan				
	.99	Bronjong				

ft



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	623	-	-	-	-	-
4	630	JEMBATAN				
	631	Jembatan pada Jalan Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan Tanah				
	.11	Tanah				
	.12	Tanaman				
	.13	Bangunan				
	.2	Bangunan sementara				
	.21	Jalan sementara				
	.22	Jembatan sementara				
	.23	Kantor proyek				
	.24	Gudang proyek				
	.25	Barak kerja				
	.26	Laboratorium lapangan				
	.27	Rumah				
	.3	Pekerjaan tanah ( Earth Work)				
	.31	Galian tanah				
	.32	Timbunan tanah				
	.4	Pondasi				
	.41	Pondasi kepala jalan				
	.42	Pondasi pilar				
	.43	Angker				
	.5	Bangunan bawah				
	.51	Kepala jembatan				
	.52	Pilar				
	.53	Piloon				
	.54	Landasan				
	.6	Bangunan				

✕

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.61	Gelagar				
	.62	Lantai				
	.63	Perkerasan				
	.64	Jalan orang/Trotoar				
	.65	Sandaran				
	.66	Talang air				
	.7	Bangunan/pengaman				
	.71	Turap penahan				
	.72	Bronjong				
	.73					
	.74	Kist dam				
	.75	Corepure				
	.76	Krib				
	.8	Bangunan pelengkap				
	.81	Rambu-rambu / Tanda-tanda lalu lintas				
	.82	Lampu penerangan				
	.83	Lampu pengatur lalu lintas				
	.84	Patok Pengamanan				
	.85	Patok ROW (Sempedan)				
	.86	Pagar				
	.9	Oprit				
	.91	Badan				
	.92	Perkerasan				
	.93	Drainase				
	.94	Baku				
	.95	Median				
	632	Jembatan pacia Jalan Luar Kota	Biasa / Terbuka	Escalon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis
	.1	Daerah penguasaan				

✓

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.11	Tanah				dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	
.12	Tanaman					
.13	Bangunan Bangunan sementara					
.2	Bangunan Sementara					
.21	Jalan sementara					
.22	Jembatan sementara					
.23	Kantor proyek					
.24	Gudang proyek					
.25	Barak kerja					
.26	Laboratorium lapangan					
.27	Rumah					
.3	Pekerjaan tanah (Earth Work)					
.31	Galian tanah					
.32	Timbunan tanah					
.4	Pondasi					
.41	Pondasi Kepala Jembatan					
.42	Pondasi pilar					
.43	Pondasi Angker					
.5	Bangunan bawah					
.51	Kepala jembatan					
.52	Pilar					
.53	Piloan					
.54	Landasan					
.6	Bangunan atas					
.61	Gelagar					
.62	Lantai					
.63	Perkerasan					
.64	Jalan orang/Trotoar					

+



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.65	Sandaran				
	.66	Talang air				
	.7	Bangunan pengamanan				
	.71	Turap/penahan				
	.72	Bronjong				
	.73	Strek dam				
	.74	Kist dam				
	.75	Corepure				
	.76	Krib				
	.8	Bangunan pelengkap				
	.81	Rambu-rambu / Tanda lalu lintas				
	.82	Lampu penerangan				
	.83	Lampu pengatur lalu lintas				
	.84	Patok pengamanan				
	.85	Patok ROW (Sempedan)				
	.86	Agar				
	.9	Oprit				
	.91	Badan				
	.92	Perkerasan				
	.93	Drainage				
	.94	Baku				
	.95	Median				
	633	-	-	-	-	-
	634	-	-	-	-	-
	635	-	-	-	-	-
5	640	BANGUNAN				
	.1	Gedung pengadlian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis
	.2	Rumah pejabat Negara				

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.3	Gedung DPR			dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	.4	Gedung Balakota Penjara Perkantoran				
	.5	Penjara				
	.6	Perkantoran				
	642	Bangunan Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Taman Kanak-kanak				
	.2	SD & Sekolah Menengah				
	.3	Perguruan Tinggi				
	643	Bangunan Rekreasi	Biasa/ Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Bangunan Olah Raga				
	.2	Gedung Kesenian				
	.3	Gedung Pemandar				
	644	Bangunan Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Pusat Perbelanjaan				
	.2	Gedung Perdagangan				
	.3	Bank				
	.4	Perkantoran				
	645	Bangunan Pelayanan Umum Kakus (MCK)	Biasa/ Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Gedung Parkir				
	.2	Rumah Sakit				
	.3	Gedung Telekomunikasi				
	.4	Terminal Angkutan Laut				
	.5	Terminal Angkutan Udara				
	.6	Terminal Angkutan darat				
	.7	Bangunan Keagamaan				
	.8					

ff

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
646	Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Keraton Rumah Tradisional		Terbatas	Escelon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
647	Bangunan Industri		Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
648	Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkotaan Inti/Sederhana Sedang/Mewah Rumah Pedesaan Rumah Contoh Real Estate Bapetarum		Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
649	Elemen Bangunan Pondasi Di atas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban Atap Lantai/Langit-langit Suspended Solit Pintu/Jendela		Biasa / Terbuka	Escelon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

tt



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.51 .52 .53 .54 .55 .56	1. Pintu Harmonik 2. Pintu biasa 3. Pintu sorong 4. Pintu kayu 5. Jendela sorong 6. Jendela vertical				
6	650	TERUMAHAN DAN PEMUKIMAN WILAYAH				
	651 .1 .2	Daerah Perdagangan / Pelabuhan Daerah pusat perbelanjaan Daerah perkotaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	652	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	653 .1 .2	Daerah Perumahan Kepadatan rendah Kepadatan tinggi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	654 .1 .2 .3	Daerah Industri Industri berat Industri ringan Industri Rumah tangga, dll	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	655	Daerah Rekreasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.1 .2 .3	Publik Garden Sport dan Playing Fields Open Space			mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	656 .1 .2 .3	Arca Transportasi (Tata letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api Jaringan sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	657 .1 .2 .21 .211 .212 .213 .214 .22 .23	Assainering Saluran pengumpulan Instalasi pengolahan Bangunan Bangunan Penyarangan Bangunan penghancur kotoran/sampah Bangunan Pengendap Bangunan Pegering lumpur Unit Densifkran Unit Perpompaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	658 .1 .11 .12 .2 .3 .31 .4 .5	Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpul Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air buangan industri limbah Kegaduhan Kebersihan Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	660	LINGKUNGAN HIDUP				

+

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.1 .2 .3 .31 .32	Persampahan Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	661	Daerah Hutan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	665	Transportasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1 .2 .3	Jaringan jalan Jaringan kereta api Jaringan sungai	-	-	-	-
	666		-	-	-	-
	667		-	-	-	-
	668		-	-	-	-



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	670	KETENAGAAAN				
	671	Listrik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis
	.1	Kelistrikan				
	.11	Kelistrikan PLN				
	.12	Kelistrikan non PLN				
	.2	Pembangkit Tenaga Listrik				
	.21	PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)				
	.22	PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)				
	.23	PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)				
	.24	PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)				
	.25	PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)				
	.26	PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)				
	.3	Transmisi tenaga listrik				
	.31	Gardu Induk/Gardu penghubung /Gardu Trafo				
	.32	Saluran udara tegangan tinggi				
	.33	Kabel Bawah tanah				
	.4	Distribusi tenaga listrik				
	.41	Gardu distribusi				
	.42	Tegangan rendah				
	.43	Tegangan menengah				
	.44	Jaringan bawah tanah				
	.5	Pengusahaan listrik				
	.51	Sambungan listrik				
	.52	Penjualan tenaga listrik				

f

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	.53	Tarif listrik					
	672	Tenaga Air		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	673	Tenaga Minyak		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	674	Tenaga Gas		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	675	Tenaga Matahari		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	676	Tenaga Nuklir		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	677	Tenaga Panas Bumi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	678	Tenaga Ulap		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
679	Tenaga Lainnya		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
9	680	PERALATAN				
	681		-	-	-	-
	682		-	-	-	-
	683		-	-	-	-
10	690	AIR MINUM				
	691	Intake Broncaptering Sumur Bendungan Saringan (Screen) Pintu air Saluran pembawa Alat ukur Perpompaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	692	Transmisi Air Baku Perpipaan Katup Udara (Air relief) Katup Penguras (blow off) Bak pelepas tekanan Jembatan pipa Syphon	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis
	693	Instalasi Pengelolaan Bangunan Ukur Bangunan Aerasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.3	Bangunan Pengendapan				
	.4	Bangunan pembubuh bahan kimia				
	.5	Bangunan pengaduk				
	.6	Bangunan saringan				
	.7	Perpompaan				
	.8	<i>Clear Hell</i>				
694		Distribusi	Biasa / Terbuka	Escion III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja	Bidang Teknis
	.1	Reservoir Menara Bawah tanah				
	.11	Menara				
	.12	Reservoir di bawah tanah				
	.2	Perpipaan				
	.3	Perpompaan				
	.4	Jembatan Pipa				
	.5	Syphon				
	.6	Hydran				
	.61	Hydran umum				
	.62	Hydran kebakaran				
	.7	Katup				
	.71	Katup udara (Air relief)				
	.72	Katup pelepas (blow off)				
	.8	Bak Pelepas Tekanan				
695			-	-	-	-
696			-	-	-	-
697			-	-	-	-

*X*

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	698	-	-	-	-	-
	699	-	-	-	-	-

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

f

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

VIII. PENGAWASAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	PENGAWASAN				
	701	Bidang Usaha Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi /Kearsipan Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	706	Bidang Organisasi / Kertatalaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

4



NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	707	Bidang Penelitian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	708	Bidang konferensi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	709	Bidang Perjalanan Dinas		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN					
	711	Bidang Pemerintahan Pusat		-	-	-	-
	712	Bidang Pemerintahan Provinsi		-	-	-	-
	713	Bidang Pemerintahan Kabupaten/ Kota		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	714	Bidang Pemerintahan Kelurahan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	715	Bidang MPR/ DPR		-	-	-	-
	716	Bidang DPRD Propinsi		-	-	-	-
	717	Bidang DPRD Kabupaten/ Kota		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	718	Bidang Hukum		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	719	Bidang Hubungan Luar Negeri		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	720	BIDANG POLITIK			tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	
	721	Bidang Keperawatan	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	722	Bidang Organisasi Masyarakat	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	724	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	726	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	727	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN				
	731	Bidang Pertahanan	Terbatas	Esclon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

T

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	732	Bidang Kemiliteran		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	733	Bidang Perlindungan Masyarakat		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	734	Bidang Keamanan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	735	Bidang Kejahatan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	736	Bidang Bencana		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	737	Bidang Kecelakaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	738			-	-	-	-
	739			-	-	-	-
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	741	Bidang Pembangunan Desa		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	742	Bidang Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	743	Bidang Kebudayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	744	Bidang Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	745	Bidang Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	746	Bidang Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	747	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	748	Bidang Media Massa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	749					
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN				
	751	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

✕

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	753	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	754	Bidang Pertambangan/Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	755	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	756	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	757	Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	758	Bidang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	759	Bidang Agraria	Biasa/ Terbuka	Esclon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	761	Bidang Pengairan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	762	Bidang Jalan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	763	Bidang Jembatan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	764	Bidang Bangunan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	765	Bidang Tata Kota		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	766	Bidang Lingkungan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	767	Bidang Ketenagaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	768	Bidang Peralatan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	769	Bidang Air Minum		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

\*



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	770	-	-	-	-	-
	771	-	-	-	-	-
	772	-	-	-	-	-
8	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	Bidang Pengadaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	782	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	783	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	785	Bidang Cuti	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	786	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

4

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	788	Bidang Pemberhentian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	789	Bidang Pendidikan Pegawai		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	790	BIDANG KEUANGAN					
	791	Bidang Anggaran		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	792	Bidang Otorisasi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	793	Bidang Verifikasi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	794	Bidang Pembukuan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	795	Bidang Perbendaharaan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	797	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	798					
	799	Bidang Bendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA  
 MUHAMMAD LUTFI

f



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

**IX. KEPEGAWAIAN**

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	800	KEPEGAWAIAN				
		Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Perencanaan				
	.2	Penelitian				
	.043	Pengaduan				
	.05	Tim				
	.07	Statistik				
	.08	Peraturan perundang- undangan				
2	810	PENGADAAN				
		Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai				
	811	Lamaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas kinerja Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Testing				
	.2	Screening				
	.3	Panggilan				
	812	Pengujian Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang Teknis

✕

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	813	Pengangkatan Calon Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat pelaksanaan fungsi dan mengganggu tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengangkatan calon pegawai Gol. I				
	.2	Pengangkatan calon pegawai Gol. II				
	.3	Pengangkatan calon pegawai Gol. III				
	.4	Pengangkatan calon pegawai Gol. IV				
	.5	Pengangkatan calon guru INPRES				
	814	Pengangkatan Tenaga Lepas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengangkatan tenaga bulanan/ Tenaga Kontrak				
	.2	Pengangkatan tenaga harian				
	.3	Pengangkatan tenaga pensiunan				
	815		-	-	-	-
	816		-	-	-	-
	817		-	-	-	-
3	820	MUTASI				
		Meliputi : Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan Pelimpahan data sering, Tugas belajar, Wajib militer				
	821	Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Tetap				
	.11	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan I				
	.12	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan II				
	.13	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan III				
	.14	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan IV				

TA

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
.15	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang cuti di luar tanggungan negara					
.2	Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan Berita Acara serah terima jabatan					
.21	Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag/Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala					
.22	Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala					
.23	Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub					
.24	Bidang/Pemeriksa					
.25	Residen/pembantu Gubernur					
.26	Wedana/pembantu Bupati					
.27	Camat					
.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)					
.29	Jabatan lainnya					
822	Kenalkan gaji berkala		Terbatas	Eselon III	tugas Organisasi Perangkat dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Pegawai golongan I					
.2	Pegawai golongan II					
.3	Pegawai golongan III					
.4	Pegawai golongan IV					
823	Kenalkan pangkat/pengangkatan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
.1	Pegawai golongan I					
.2	Pegawai golongan II					
.3	Pegawai golongan III					
.4	Pegawai golongan IV					

4



No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	824	Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan Pegawai golongan I Pegawai golongan II Pegawai golongan III Pegawai golongan IV Lolos Butuh Kurikulum dan Silabus Proposal (TOR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	825	Datasering dan Penempatan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	826	Penunjukkan Tugas Belajar Dalam Negeri Luar Negeri Tunjangan Belajar Penempatan kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	827	Wajib militer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	828	Mutasi dengan instansi lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	829					

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	830	KEUDUDUKAN				
		Meliputi: Penghitungan masa kerja, Penyesuaian pangkat/gaji, Penghargaan ijazah dan jenjang pangkat				
	831	Penghitungan masa kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	832	Penyesuaian pangkat/gaji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Pegawai golongan I				
	.2	Pegawai golongan II				
	.3	Pegawai golongan III				
	.4	Pegawai golongan IV				
	833	Penghargaan ijazah / Penyesuaian ijazah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	834	Jenjang Pangkat / Eselonering			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	835		-	-	-	-
	836		-	-	-	-
	837		-	-	-	-
5	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
		Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan				

✶

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	1	2	3	4	5	6	7
		kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/tanah, Bantuan sosial, Rekreasi dan Dispensasi								
841	Tunjangan	Tunjangan Jabatan Kehormatan Kematian / Uang duka Tunjangan hari raya Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah keluarga Pangan, Sandang, papan (Bapetarum)	Biasa/ Terbuka							
842	Dana	Dana Taspem Kesehatan Asuransi	Biasa/ Terbuka							
843	Perawatan Kesehatan	Poliklinik Perawatan dokter Obet-obatan Keluarga Berencana	Biasa/ Terbuka							
844	Koperasi/Distribusi	Distribusi Pangan Distribusi Sandang Distribusi Papan	Biasa/ Terbuka							
845	Perumahan /Tanah	Perumahan pegawai	Biasa/ Terbuka							

4



No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.2	Tanah kapling			dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	.3	Losmen/hotel				
	846	Bantuan sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Bantuan Kebakaran				
	.2	Bantuan kebanjiran				
	847		-	-	-	-
	848		-	-	-	-
	849		-	-	-	-
6	850	CUTI				
	851	Cuti tahunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	852	Cuti besar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	853	Cuti sakit	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
854	Cuti hamil		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
855	Cuti naik haji/ Umroh		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
856	Cuti di Luar Tanggungan Negara		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
857	Cuti Alasan Penting/ Cuti alasan lain		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
858			-	-	-	-
859			-	-	-	-
7	860	PENILAIAN				
		Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian dinas, Penilaian kekayaan pribadi, dan Rehabilitasi				
	861	Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Bin'rang/Satyalencana				
	.2	Kenaikan pangkat anumerta				
	.3	Kenaikan gaji istimewa				
	.4	Hadiah berupa uang				

No.	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
862	.5 Pegawai Teladan .1 Teguran Peringatan .2 Penundaan kenaikan gaji .3 Penurunan pangkat .4 Pemindahan Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan terhormat lihat 887 dan 888	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kota Bima	Bidang Teknis	
863	Kondite, DP3, Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
864	Ujian dinas .1 Tingkat I .2 Tingkat II .3 Tingkat III	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
865	Penilaian kehidupan pegawai Negeri. Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, kekayaan pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
866	Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis	
867						



No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	868	-	-	-	-	-
	869	-	-	-	-	-
8	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				
		Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi,				
		Dafar riwayat hidup, Hak, Pengajian,				
		Sumpah/janji, dan Korps pegawai				
	871	Formasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	872	Bezetting/ Dafar Urut Kepegawaian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	873	Registrasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		.1 NIP				
		.2 KARPEG				
		.3 Legitimasi/Tanda pengenal				
		.4 Dafar keluarga /kip4, Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu				
	874	Dafar Riwayat Pekerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		.1 Tanggal lahir				
		.2 Penggantian Name				
		.3 Izin Kepartaian organisasi				
	875	Kewenangan Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis
		.1 Pelimpahan wewenang				

7

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.2	Specimen tanda tangan			dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	876	Penggajian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	SKPP				
	877	Sumpah/Janji pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	878	Koprs Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	879					
9	880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI				
	881	Meliputi: Atas Pemberhentian, Permintaan sendiri, Dengan hak pensiun, Karena meninggal dunia, Alasan lain, Dengan diberi uang pesangon, Uang tunggu untuk sementara waktu, dan pemberhentian tidak dengan hormat				
	882	Permintaan sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		Dengan Hak Pensiun	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.1	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. I			mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	
	.2	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. II				
	.3	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. III				
	.4	Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Pegawai Negeri Gol. VI				
	.5	Pensiun Janda/duda				
	.6	Pensiun Yatim Piatu				
	.7	Uang muka Pensiun				
	883	Karena meninggal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Karena Meninggal dalam tugas				
	884	Alasan lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	885	Uang pesangon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	886	Uang Tunggu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis



No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	887	Untuk sementara waktu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah	Bidang Teknis
	888	Tidak dengan hormat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah	Bidang Teknis
	889	-	-	-	-	-
10	890	PENDIDIKAN PEGAWAI				
		Meliputi: Perencanaan, Pendidikan reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Luar negeri, Metode, Tenaga pengajar, Administrasi pendidikan, Fasilitas sarana pendidikan				
	891	Perencanaan Program	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	Kurikulum dan Silabi				
	.2	Proposal (TOR)				
	.3					
	892	Pendidikan reguler / Kader	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	IPDN/APDN				
	.2	Kursus-Kursus Reguler				
	893	Pendidikan dan Pelatihan /Non Reguler	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	.1	LEMHANAS				
	.2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMA, ADUMLA, ADUM				
	.3	Kursus-Kursus /Penataran				
	.4	Diklat Teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan				

✓

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	1	2	3	4	5	6	7
894	.1 .2	Pendidikan Luar negeri Berkesinambungan/berkala /bergelar Non Gelar/ Diploma	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis				
895	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7	Metode Kuliah Ceramah, simposium Diskusi, raker, seminar, lokakarya, orientasi Studi lapangan, KKN, Widyawisata Tanya Jawab, Silabi, Modul, Kursil Penugasan Gladi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis				
896	.1	Tenaga pengajar/Widyaiswara/Nara sumber Moderator	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis				
897	.1 .2 .3 .4 .5	Administrasi pendidikan Tahun pelajaran Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, ujian STTP Penilaian Angka Kredit Laporan pendidikan dan Pelatihan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis				
898	.1 .2	Fasilitas Belajar Tunjangan belajar Asrama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis				

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	.3 .4 .5 .6 .7 .8	Uang makan Uang Transport Uang buku Uang Ujian Uang Semester / Uang kuliah Uang saku				
	899 .1 .2 .3	Sarana Bantuan sarana belajar Bantuan alat-alat tulis Bantuan sarana belajar lainnya	Biasa / Terbuka	Escalon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah / unit kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN X  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

**X. KEUANGAN**

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2		3	4	5	6	7
1	900	KEUANGAN					
	901	Nota keuangan		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia Daerah Kota Bima	Bidang Teknis
	902	APBN		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	903	APBD		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	904	APBN-P		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	905	Dana Alokasi Umum		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1

NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	906	Dana Alokasi Khusus		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	907	Dekonsentrasi (Pelimpahan dana dari pusat ke daerah)		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	908			-	-	-	-
	909			-	-	-	-
2	910	ANGGARAN					
	911	Rutin		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	912	Pembangunan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	913	Anggaran Belanja Tambahan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	914 .1	Daftar Isian Kegiatan (DIK) Daftar Usulan Kegiatan (DUK)		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

X

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	915	Daftar Isian Proyek (DIP) Daftar Usulan Proyek (DUP) .2 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	916	Revisi Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	917		-	-	-	-
	918		-	-	-	-
	920	OTORISASI/SKO	-	-	-	-
3	921	Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	922	Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	924	Ralat SKO	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	925		-	-	-	-
	926		-	-	-	-

8



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	927	-	-	-	-	-
4	930	VERIFIKASI				
	931	S.P.M Rutin (Daftar P80)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	932	S.P.M Pembangunan (Daftar P80)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	933	Penerimaan (Daftar P6, P7)		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	934	SPJ Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	935	SPJ Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	936	Nota Pemeriksaan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kota Bima	Bidang Teknis

8

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	938		-	-	-	-
	939		-	-	-	-
5	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	943	Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	944		-	-	-	-
	945		-	-	-	-
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

✶

NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	953	Penghapusan Kekayaan Negara		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan Pengangkatan /Pemberhentian Bendaharawan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	955	Spesimen Tanda Tangan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	957			-	-	-	-
	958			-	-	-	-
	959			-	-	-	-
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHAARAAN					
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis



NO	KLASIFIKASI	JENIS	AR SIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendahara		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	964			-	-		-
	965			-	-		-
	966			-	-		-
8	970	PENDAPATAN					
	971	Perimbangan Keuangan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	972	Subsidi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	974	Retribusi		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

7

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	
	975	Bea		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	976	Cukai		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	977	Pungutan /PNBP		Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	978	Bantuan Presiden, Menteri, dan Bantuan lainnya		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	979			-	-	-	-
	980			-	-	-	-
	981			-	-	-	-
9	990	BENDAHARAWAN					
	991	SKPP/SKPPS		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	992	Teguran SPJ		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

NO	KLASIFIKASI	JENIS	ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
	993	-		-	-	-	-
	994	-		-	-	-	-
	995	-		-	-	-	-
	996	-		-	-	-	-
	997	-		-	-	-	-
	998	-		-	-	-	-
	999	-		-	-	-	-

WALIKOTA BIMA

MUHAMMAD LUTFI

1